

AGAMA-AGAMA: BERKAH ATAU KUTUKAN BAGI BANGSA INDONESIA

Oleh
Franz Magnis-Suseno SJ

PENGANTAR

Belum pernah situasi bangsa Indonesia sedemikian memcemaskan daripada waktu tulisan ini dipersiapkan untuk dicetak. Tersenggol sedikit pun orang langsung akan menarik parang, atau, lebih buruk, mencari kawan-kawan sekampung, lalu mencari yang menyenggol. Dia itu sendiri akan memobilisasikan kampungnya sendiri. Dan langsung kita mendapat perang antara kampung. Lebih gawat lagi kalau kampung yang satu itu suku A, yang satunya suku B. Lebih gawat lagi seperti terjadi di Ambon: Kampung satu itu Muslim, sebagian pendatang, dan kampung yang satunya Kristen, penduduk aseli. Dan terjadi sesuatu yang belum pernah

terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia: orang Kristen membunuh orang Islam karena mereka Islam dan orang Islam membunuh orang Kristen karena mereka Kristen.

Jelas kiranya bahwa masalahnya tidak terletak dalam agama- agama yang bersangkutan *an sich*, melainkan dalam krisis solidaritas sosial menyeluruh yang dialami bangsa Indonesia sebagai akibat puluhan tahun penindasan dan ketidakadilan di bawah pemerintah Orde Baru. Namun penjelasan ini tidak memberi banyak hiburan. Kenyataan bahwa di semua garis sambung keanekaan masyarakat selalu dapat pecah kekerasan dan pembunuhan: antara suku, antara umat beragama, antara penduduk asli dan pendatang, antara "rakyat" dan "the haves", bahkan antara kampung dan desa saja, adalah amat mencemaskan.

Maka meskipun alasan situasi gawat ini lebih bersifat sosio-psikologis daripada teologis, agama-agama pun wajib berat menyumbang agar situasi itu tidak berlangsung terus.

Dalam karangan ini¹ saya mengandaikan bahwa sebenarnya hubungan antara umat beragama bisa baik juga. Saya bertanya: Bagaimana agar agama-agama betul-betul menjadi sumber keluhuran budi masyarakat? Apa yang perlu kita lakukan agar potensi-potensi positif agama diperkuat, dan potensi-potensi destruktif diamankan? Saya mencoba mem-

bahas pertanyaan itu dari wawasan Katolik. Pertama saya akan menyebutkan beberapa pengandaian pandangan saya. Kedua, saya mencoba menguraikan dasar teologis sikap-sikap yang dituntut dari orang-orang Kristen. Ketiga, saya memasuki syarat-syarat yang perlu terpenuhi agar sikap-sikap itu dapat menjadi operasional. Sebagai penutup saya mengajukan beberapa pikiran tentang apa yang dapat dilakukan.

I. BEBERAPA PENGANDAIAN

Prasaran ini bertolak dari pengandaian bahwa sumbangan agama-agama terhadap pembangunan harkat moral dan spiritual bangsa perlu mendapat pendasaran teologis. Maksud saya, masalahnya bukan bagaimana mengkompromiskan tuntutan agama masing-masing dengan keperluan hidup bersama, melainkan menunjukkan bahwa ajaran agama-agama justru mengimplikasikan sikap-sikap yang secara positif membangun kehidupan bangsa.

Sikap-sikap manusia terbaik pun hanya bisa berkembang apabila ia merasa bebas dari keresahan, ketakutan dan perasaan diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu agama-agama hanya dapat memainkan peranan mereka yang positif apabila dijamin situasi di mana umat-umat mereka

merasa aman, dengan hak-hak mereka terlindung, dan diperlakukan dengan wajar.

Menurut hemat saya, kesulitan-kesulitan antara umat-umat beragama jarang bersumber pada ajaran agama-agama *an sich*, misalnya karena kita menganggap agama kita sendiri sebagai yang paling benar, melainkan berdasarkan salah faham, prasangka dan sikap saling curiga. Maka yang paling penting agar agama-agama dapat memainkan peranan mereka yang positif adalah membongkar tembok-tembok prasangka dan kecurigaan itu.

Ada pengandaian yang lebih abstrak dan filosofis. Dalam pengertian "agama" perlu dibedakan: Agama *an sich* [agama secara teologis], dan agama dalam pengertian orang [agama secara sosiologis, psikologis dsb.]. Agama *an sich* bersumber pada Allah dan karena itu mutlak dan sempurna; agama *an sich* itu mustahil mempunyai akibat tidak baik bagi masyarakat mana pun juga. Akan tetapi pengertian manusia tentang agama, termasuk pengertian orang takwa terhadap agamanya sendiri, tetaplah pandangan dan penghayatan manusia, jadi tidak pernah mutlak dan tidak pernah sempurna. Begitu misalnya pandangan yang saya yakini tentang agama Katolik, agama saya sendiri, tetap tidak identik dengan hakekat agama Katolik.

Di sini saya melihat sumber segala kepicikan dan keke-
rasan hati yang ditemukan dalam agama-agama [dilihat se-
cara sosiologis]: Manusia beragama lupa perbedaan antara
keagamaannya sendiri dengan agamanya *an sich*. Ia menga-
tasnamakan kemutlakan agama lalu memutlakan pan-
dangannya sendiri tentang agamanya, suatu penyeleweng-
an yang sebenarnya serius mengingat yang mutlak hanya-
lah satu, Allah. Sebaliknya, apabila kita sadar bahwa kita
sendiri tak pernah memadai dengan agama yang kita anut,
kita akan mengikuti dan mempercayainya dengan rendah
hati, tetapi meletakkan penilaian terhadap suara hati orang
lain ke dalam tangan Dia yang memang berhak, Allah.

II. PENDASARAN TEOLOGIS

Berikut ini saya mencoba merumuskan sikap-sikap apa
yang menurut ajaran kristiani, dalam pandangan Katolik²,
diharapkan menuntun umat Katolik dalam partisipasinya
dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini teologis dan
normatif, berdasarkan Injil. Dalam ini kami umat Kristen
sangat sadar betapa kenyataan sikap dan kelakuan kami,
orang yang berdosa, masih jauh dari norma itu.

1. Sikap dasar

Antara orang-orang kristen tak ada perbedaan tentang
sikap dasar yang dituntut Yesus dari para pengikutnya: Ia

menuntut sikap cintakasih, atau, dengan kata lebih sederhana, kebaikan hati, terhadap siapa pun, tanpa batas, tanpa syarat, tanpa pamrih. Dan dua sikap yang paling dicela Yesus adalah kesombongan dan kekerasan hati.

Sebagaimana kelihatan misalnya dalam khotbah di gunung [Mt. 5 dst.], Yesus menuntut sikap baik hati itu tanpa batas. Terhadap lawan pun hati harus tetap baik. Orang bersalah harus dimaafkan, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh tujuh kali. Segala sikap dengki, benci, iri, curiga, prasangka, dendam, maupun sikap tak peduli oleh Yesus tidak dibenarkan.

2. Pengejawantahan sikap dasar dalam kehidupan masyarakat

Sikap dasar, yaitu kebaikan hati, perlu menjiwai seluruh bentuk partisipasi orang kristen dalam kehidupan masyarakat. Secara tradisional sikap ini terungkap dalam perhatian pada orang-orang miskin, sakit, para janda dan yatim piatu. Perubahan-perubahan mendalam yang dialami masyarakat dalam rangka budaya kemodernan telah mendorong Gereja Katolik untuk merumuskan panggilannya dalam masyarakat dengan mempergunakan faham-faham yang modern juga. Berikut ini saya menyebutkan saja beberapa faham pokok ajaran Gereja Katolik dalam tingkat kesadarannya sekarang.

Panggilan dasar segenap manusia dalam masyarakat, dalam pandangan Gereja Katolik, adalah menghormati dan melindungi martabat setiap warga masyarakat sebagai manusia. Kaitan tuntutan itu dengan cintakasih adalah sederhana: Mencintai pertama-tama berarti menghendaki keutuhan orang yang dicintai, maka dasar segala sikap manusiawi adalah hormat terhadap martabat manusia. Dan karena hormat terhadap martabat manusia menjadi nyata dalam hormat terhadap hak-hak asasinya, maka pengakuan dan sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia segenap orang dan segenap golongan orang sekarang menempatkan tempat kunci dalam ajaran sosial Gereja.³ Kesadaran itu sangat penting, karena di sini Gereja mendobrak secara sadar dan eksplisit keterbatasan wawasan primordialnya: Harkat dan hak dasar segenap orang, sebagai manusia, dan tidak lagi sebagai orang kristen atau bukan kristen, menjadi acuan. Pengakuan terhadap martabat manusia itu mengimplikasikan pengakuan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Pengakuan terhadap martabat manusia langsung mengimplikasikan bahwa orang Katolik wajib memperjuangkan keadilan sosial. Ketidakadilan tidak boleh dianggap sepi, juga kalau yang menjadi korbannya adalah orang di luar golongan sendiri. Sikap dasar terhadap sesama manusia adalah solidaritas dengan orang yang lemah, miskin, lapar, menderita, di dalamnya Gereja melihat Yesus sendiri (bdk.

Mt. 25). Istilah solidaritas adalah istilah kunci.⁴ Solidaritas berarti: Berada di dekat orang yang dalam kesulitan, dengan hati yang ikut merasakan, dengan kesediaan untuk tidak meninggalkannya, untuk membantu mengubah nasibnya yang buruk, tetapi sekaligus untuk menghormati kedirian dan identitasnya, jadi untuk tidak menjadikannya menjadi objek kita, juga bukan objek kebaikan kita. Solidaritas hanya benar apabila tanpa pamrih.

Solidaritas membuktikan diri dari sikap terhadap mereka yang tidak dapat membalas kebaikan kita, mereka yang lemah, marginal, tidak berdaya, miskin. Istilah yang sering dipakai Paus Yohannes Paulus sekarang dan yang lahir dari teologi pembebasan adalah *preferential option for the poor*.⁵ Dalam orang-orang lemah dan miskin umat kristen melihat Yesus sendiri [bdk. Mt. 25].

Dalam hubungan ini dapat dicatat penegasan ajaran sosial Katolik bahwa "Gereja tidak memiliki model-model [tatanan sosial- ekonomis-politis masyarakat, FMS] untuk ditawarkan".⁶ Tidak ada konsepsi tatanan negara atau ekonomi yang khas Katolik. Oleh karena itu orang-orang Katolik dianjurkan bekerja sama dengan seluruh masyarakat. Mereka tidak melakukan pembangunan menurut konsepsi tertentu, melainkan dalam berpartisipasi dengan seluruh masyarakat, berdasarkan landasan yang sama.⁷

3. Sikap terhadap agama-agama lain

Berdasarkan kesadaran baru akan martabat dan hak-hak asasi manusia itu Gereja Katolik, dalam Konsili Vatikan II (1962-1965), menentukan sikapnya terhadap agama-agama lain. Ada empat hal yang relevan di sini: (1) Gereja Katolik menyatakan bahwa menurut kepercayaannya orang di luar Gereja pun dapat diselamatkan [masuk surga] [Lumen Gentium nr. 15 dan 16]. (2) Ia menegaskan bahwa agama-agama bukan-kristiani: Hinduisme, Buddhisme, Islam dan Yahudi, harus dihormati dan diakui segala apa "yang benar dan suci" di dalam mereka ("Nostra Aetate"). (3) Ia merumuskan kembali kewajibannya untuk memaklumkan Injil ke seluruh dunia (dalam "Ad Gentes"),⁸ dengan sekaligus "melarang segala cara yang tidak wajar" [nr. 13]. (4) Dalam "Dignitatis Humanae" Gereja mengakui hak atas kebebasan beragama.⁹

RANGKUMAN SEMENTARA

Dalam sejarah Gereja Katolik Konsili Vatikan yang berlangsung dari tahun 1962 sampai dengan 1965 memainkan peranan yang penting. Dalam Konsili itu, berhadapan dengan dunia modern yang menilai tinggi pluralisme, toleransi, dan keuniversalan harkat kemanusiaan, Gereja Katolik akhirnya berani untuk secara eksplisit menarik implikasi-

implikasi dari tuntutan inti etikanya, yaitu cintakasih dan penolakan terhadap segala kebencian dan kekerasan hati: Ia mendobrak wawasan primordial yang sampai saat itu banyak menggelapkan hakekat pewartaannya. Baru dengan demikian Gereja Katolik dapat menjadi partner penuh bersama semua orang dan golongan yang bercita-cita membangun masyarakat yang sesuai dengan martabat manusia.

III. MEMBONGKAR TEMBOK-TEMBOK KECURIGAAN

Kiranya semua agama menjunjung tinggi nilai-nilai keba-
ikan hati, toleransi dan hormat terhadap martabat manusia. Kenyataan itu justru menjadikan lebih mendesak pertanyaan: Lalu mengapa antara agama-agama begitu sering terjadi ketegangan, ketegangan yang kadang-kadang meledak dalam tindakan-tindakan amat tercela?

1. Tembok-tembok salah faham dan kecurigaan

Seperti telah saya sebutkan, saya bertolak dari pengandaian bahwa sebab musabab ketegangan-ketegangan itu tidak terletak dalam ajaran agama dan juga tidak dalam perbedaan-perbedaan objektif yang ada. Yang memisahkan umat-umat agama-agama satu sama lain berupa tembok-tembok salah faham, prasangka dan kecurigaan.

Salah faham amat mudah terjadi antara dua kelompok yang tidak saling mengenal. Cepat sekali dua-duanya saling memandang penuh kecurigaan. Kegiatan agama lain mudah disalahfahami, salah faham mana memperkuat kecurigaan itu. Kecurigaan itu seperti kaca mata yang membuat apa pun yang dipandang dilihat dalam warna suram dan negatif. Karena curiga, pelbagai prasangka mudah berkembang dan sebaliknya memperkuat sikap curiga itu. Lebih-lebih kalau prasangka itu menimbulkan perasaan takut. Agama mayoritas akan takut bahwa kebesaran hatinya disalahgunakan oleh agama minoritas untuk meliciki dan menggerogotinya. Agama minoritas takut ditekan dan ditindas oleh agama mayoritas. Karena rasa takut dan curiga itu masing-masing mengambil sikap defensif, maka tidak lagi dapat berkomunikasi secara wajar lagi, melainkan semakin kena fiksasi pada sikap melindungi diri dan mencoba mencegah jangan yang satunya bisa maju. Nampak jelas bahwa situasi semacam itu tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kekhasan masing-masing agama, tetapi menjadi masalah mekanisme psikologi sosial.

Perkembangan semacam itu adalah tragis dan sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan dari kita semua. Syukur, di Indonesia, meskipun ada kesulitan, keadaan tidak pernah seburuk itu. Hubungan antara agama, baik di tingkat "atas", maupun di tingkat lokal banyak yang

baik dan berdasarkan kepercayaan. Itulah modal yang perlu kita pergunakan dan kita perluas. Maka sangat perlu tembok-tembok salah faham dan kecurigaan yang masih ada dibongkar.

2. Membongkar tembok-tembok yang memisahkan

Bagaimana kita dapat makin membongkar tembok-tembok kecurigaan dan prasangka? Itulah kiranya tantangan bagi agama-agama. Akan tetapi, agar usaha agama-agama dapat menjadi efektif, ada satu syarat yang menurut hemat saya perlu diusahakan: Antara mayoritas dan minoritas secara fisik dengan sendirinya selalu ada ketidakseimbangan. Sebuah minoritas baru dapat mengembangkan sikap-sikap positif dan terbuka apabila ia merasa aman dan diperlakukan secara wajar, apabila dia bebas dari rasa takut. Umat Katolik Indonesia misalnya senantiasa mengajukan pengalaman-pengalaman yang khas bagi sebuah minoritas: Bahwa mereka hampir di mana pun dipersulit membangun gereja sehingga tidak tahu di mana harus merayakan misa, bahwa berdoa bersama pun kadang-kadang dilarang, bahwa mereka mengalami pelbagai diskriminasi. Dari agama-agama mayoritas di sini diharapkan kebesaran hati. Sedangkan Pemerintah perlu, atas dasar Undang-undang Dasar yang berlaku, menjamin kebebasan semua agama untuk hidup serta beribadat menurut iman dan kepercayaan me-

reka di seluruh wilayah Indonesia serta harus menjamin bahwa tindakan di luar hukum dan main hakim sendiri ditindak dengan tegas. Pemerintah harus menjamin hak-hak semua umat beragama. Saya berpendapat bahwa Pemerintah, melalui penegakan hukum yang tidak pandang bulu, harus menciptakan kerangka bagi usaha-usaha masyarakat beragama sendiri untuk mengatasi kesulitan komunikasi yang masih ada. Karena persis itulah fungsi hukum. Mengajak bermusyawarah daripada menegakkan hukum hanya menguntungkan mereka yang memang ingin rusuh, biasanya dari motif-motif yang sama sekali tidak ada hubungan dengan agama. Adalah kewajiban Pemerintah untuk menjamin kerangka keadilan dan kewajaran bagi kehidupan beragama.

Akan tetapi, Pemerintah memang tidak dapat mengambil alih apa yang menjadi tanggungjawab agama-agama sendiri, yaitu membangun hubungan yang baik dan ariief di antara mereka. Kiranya sudah jelas bahwa yang paling penting adalah agar agama-agama saling mengenal. Tak ada jalan lebih jitu untuk mendobrak salah faham daripada saling mengenal dari lebih dekat. Kita perlu meningkatkan komunikasi. Di semua tingkat keumatan. Kita akan melihat bahwa penganut agama lain ya orang biasa, bukan setan dan juga bukan superman, dengan kelemahan tetapi juga kebaikannya. Kita juga perlu membangun sikap positif ter-

hadap agama lain. Banyak sekali hal yang ditakutkan lalu akan kelihatan tidak nyata. Menurut psikologi modern salah satu sarana penting untuk meningkatkan kesehatan psikis adalah positive thinking. Positive thinking secara kolektif di antara agama-agama pun akan memperkuat kedirian kita. Kita perlu membongkar ketakutan-ketakutan yang melumpuhkan kita.

Dalam rangka itu perlu juga kita masing-masing mengetahui sikap apa pada kita yang membuat orang beragama lain merasa takut. Apa dasar dia punya prasangka? Selain saling memberi penjelasan juga perlu kita ubah sikap-sikap yang mudah disalah fahami. Sebagai contoh saja: Barangkali banyak orang kristen tidak mengerti bahwa, dan mengapa, banyak orang Islam mengkhawatirkan kristenisasi. Dan sebaliknya ada orang Muslim tidak mengerti mengapa kebanyakan orang kristen amat takut islamisasi.

Tidak semua masalah adalah sekadar masalah salah faham. Ada hal-hal di mana memang ada perbedaan faham. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan itu - di mana entah kepentingan, entah perasaan spontan identifikasi dengan agama sendiri menyuarakan keberatan - tidak perlu menghalang-halangi hubungan baik antara agama-agama. Yang menghalangi adalah kecurigaan. Maka perbedaan-perbedaan yang masih ada perlu dibicarakan secara terbuka, de-

ngan rendah hati dan dalam semangat persaudaraan dalam Tuhan. Kecurigaan akan hilang kalau kita berkomunikasi dengan jujur satu sama lain. Dalam rangka ini perlu misalnya hal kristenisasi dan islamisasi dibicarakan dengan tenang dan terbuka. Menurut saya akan kelihatan bahwa 90 persen kekhawatiran sekitar kompleks itu berdasarkan salah faham, tetapi sepuluh persen bisa ada perbedaan. Tetapi kalau 10 persen itu kita bicarakan dengan terbuka dan dalam semangat saling menerima, kemungkinan besar kedua-belah fihak akan saling mengerti, meskipun tidak pasti se-pakat. Misalnya, dalam hal perkawinan campur ya jelas, fi-hak Katolik ingin agar fihak Islam masuk Katolik dan ke-luarga baru itu Katolik, dan fihak Islam mengharapkan agar fihak Katolik masuk Islam dan anak-anak tetap Muslim yang baik. Justru sebagai orang yang tahu bahwa akhirnya segalanya berada di tangan Tuhan, kita orang beragama pasti mampu menangani perbedaan-perbedaan objektif seperti itu dalam semangat tenang, jujur dan tanpa mem-berikan ruang kepada emosi-emosi negatif.

Maka dengan mengatasi salah faham melalui pengakrab-an komunikasi, dan dengan dialog terbuka dan jujur dalam hal-hal di mana kita tidak seluruhnya dapat bersatu faham, kita betul-betul dapat membangun hubungan yang baik.

PENUTUP

Agar agama dapat menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, agama-agama perlu saling menghargai dan berkomunikasi. Di sini perlu ada proses belajar. Proses itu dapat mengandalkan toleransi dan sikap tenggang rasa yang telah lama dimiliki bangsa Indonesia.

Kiranya peran para pemuka agama sangat penting. Merekalah yang dapat mengantarkan umat-umat mereka ke dalam proses belajar itu. Mereka sendiri akan memberikan contoh orang yang tidak lagi dikuasai oleh emosi spontan melainkan berpandangan positif dan terbuka. Mereka perlu membimbing umat ke sikap positif terhadap umat-umat lain, menenangkan emosi kalau sedang panas, mengingatkan ajaran agama sendiri yang mengajak membangun sikap cinta kasih dan menolak segala sikap picik, benci dan negatif. Bahkan perlu membuka mata umat terhadap kebaikan agama lain yang barangkali masih ditakuti atau dicurigai. Alangkah baiknya kalau umat beragama dapat betul-betul saling menerima dan saling menghargai, tanpa melepaskan keyakinan agama masing-masing. Perlu dipunyai nafas panjang dan kesabaran yang mengetahui bahwa perubahan sikap membutuhkan waktu.

Komunikasi dan toleransi positif itu akan sangat didukung, apabila agama-agama bersatu dalam menanggulangi masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia: Masalah keadilan sosial, masalah kemiskinan, masalah identitas bangsa berhadapan tantangan modernisasi, pengembangan warisan rohani bangsa, dengan nilai-nilainya berhadapan dengan budaya konsumtif yang semakin keras. Agama-agama saya harapkan bahu-membahu membela martabat manusia dan berada di baris terdepan mereka yang melindungi hak asasi setiap warga masyarakat sebagai manusia. Bersama kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat berdasarkan solidaritas, di mana orang-orang yang miskin, lemah dan paling tidak berdaya tidak dibiarkan menjadi korban pembangunan. Agama-agama dapat menjadi kekuatan penting melawan ketidak-jujuran, korupsi dan penyelewengan moral.

Kiranya pesan-pesan agama-agama akan meyakinkan apabila orang-orang beragama membuktikan diri berbudi luhur, berpandangan luas, toleran, pecinta perdamaian, bersedia memaafkan, bertekad menegakkan keadilan, berbe-laskasih dan berkebaikan. Bangsa Indonesia berhak mengharapkan yang terbaik dan luhur dari agama-agama-nya. ■



Catatan-catatan

- 1 Karangan ini berkembang dari sebuah ceramah yang saya berikan beberapa tahun lalu dalam rangka acara Badan Litbang Agama Departemen Agama.
- 2 Sebenarnya tak ada perbedaan dengan pandangan Protestan dalam hal ini; akan tetapi saya akan mendasarkan diri juga pada ajaran pimpinan Gereja Katolik.
- 3 Hak-hak asasi manusia untuk pertama kali disebutkan sebagai sesuatu yang hakiki dalam menjamin martabat manusia, dan oleh karena itu perlu dijujung tinggi, dalam ensiklik (surat edaran) *Pacem in Terris* Paus Johannes XXIII (1963), kemudian menjadi ajaran resmi Gereja dalam Konsili Vatikan II (*Gaudium et Spes, Nostra Aetate*). Dalam ajaran Johannes Paulus II hak-hak asasi mengambil tempat kunci.
- 4 Lihat terutama ensiklik Paus Johannes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis* (SRS, 1987).
- 5 Johannes Paulus II, *Centesimus Annus* (CA, 1991) nr. 11, 56, 57, SRS nr. 42.
- 6 CA, nr. 43.
- 7 Bdk. SRS nr. 47; itulah sebab teologis orang-orang Kristen dapat tanpa ragu-ragu mendasarkan diri pada nilai-nilai bangsa yang murni, misalnya di Indonesia pada Pancasila.
- 8 Dalam dokumen itu dengan tegas dirumuskan cara-cara pemakluman yang tidak dapat dibenarkan: "Gereja melarang keras bahwa seseorang dipaksa untuk menerima iman atau dipengaruhi atau dibujuk dengan sarana-sarana yang tidak wajar" [nr. 13].

- 9 Di situ juga dimuat peringatan agar kebebasan itu tidak disalahgunakan untuk misalnya membujuk orang-orang sederhana [nr. 4]; juga diakui hak orangtua agar anak-anak mereka dididik menurut keyakinan keagamaan mereka [nr.5]. - Dekrit itu ditentang dengan keras oleh sebuah minoritas konservatif di bawah pimpinan Kardinal Ottaviani. Dari mereka itu berasal Uskup Lefebvre, pimpinan fundamentalisme ekstrem Katolik, yang kemudian memisahkan diri dari Gereja Katolik.

